



**PEMERINTAH DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)
TAHUN 2024**



**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T karena dengan rahmat dan kurniannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2024 dapat diselesaikan, sehingga dapat memenuhi amanat peraturan perundang-undangan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kewenangan Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan dan bagian dari jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, perlu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kewenangan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dalam bentuk laporan yang menggambarkan capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2024.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh anggota tim yang terlibat dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh maupun pihak-pihak lainnya yang ikut memberikan kontribusi sehingga penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan dengan baik.

Payakumbuh, Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

JUNAIDI, ST
Pembina/ IV.a
NIP. 196601311998031003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan	2
I.3. Gambaran Umum Dinas	2
I.3.1. Tugas Pokok Fungsi	3
I.3.2. Sumber Daya Manusia	4
I.3.3. Sumber Daya Peralatan (aset)	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
II.1. Rencana Strategis	10
II.2. Indikator Kinerja Utama	11
II.3. Perjanjian Kinerja 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
III.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	14
III.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	16
III.3. Akuntabilitas Keuangan	49
III.4. Prestasi dan Penghargaan	51
BAB IV	52
P E N U T U P	52

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyesusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian

kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan:

1. Sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban, dan sekaligus sebagai media peningkatan kinerja.
2. Untuk lebih mengetahui hasil kinerja Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh periode tahun 2024.
3. Agar sumber-sumber anggaran yang dialokasikan penggunaannya dapat lebih efektif dan efisien pemakaiannya.
4. Sebagai dasar penilaian kinerja dan pedoman dalam meningkatkan kinerja.

Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini bertujuan :

1. Sebagai indikator dalam melihat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.
2. Dapat menjadi acuan dalam menyusun Lakip Pemerintah Kota Payakumbuh dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Payakumbuh.
3. Sebagai program strategis dalam pengembangan sumber daya manusia.

I.3. Gambaran Umum Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan perubahan atau penyetaraan di level eselon 4 menjadi pejabat fungsional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1.3.1. Tugas Pokok Fungsi

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik.

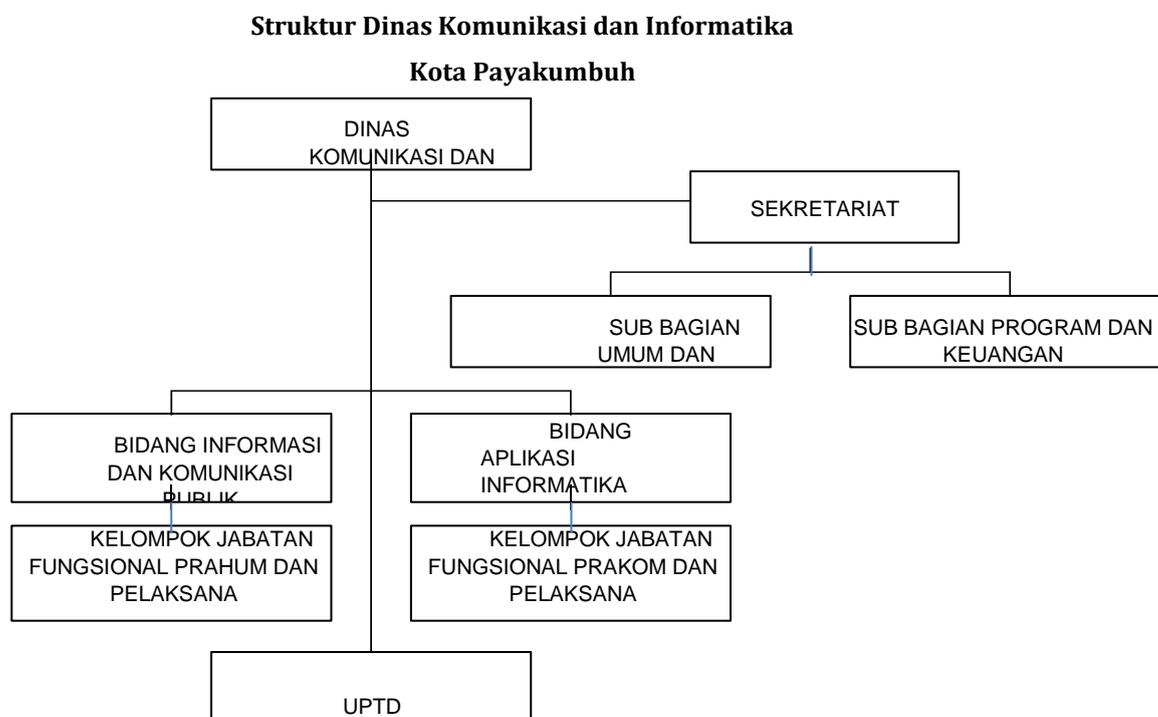
Dalam menjalankan tugas pokok dimaksud Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu :

- 1) **Sekretaris** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- 2) **Kasubag Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- 3) **Kasubag Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.
- 4) **Kabid Kehumasan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang kehumasan.
- 5) **Kabid Penyelenggaraan E-government** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan e-government.
- 6) **Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Kehumasan** mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan

- 7) **Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer** mempunyai tugas pelaksana pelaksana teknis fungsional di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer pada Instansi Pemerintah.
- 8) **Pelaksana** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melaksanakan Tugasnya



1.3.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas dan Komunikasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut

:

- a. Berdasarkan Golongan PNS

Tabel I.1

Distribusi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Golongan.

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	23 Orang
4.	IV	2 Orang
Total		29 Orang

b. Berdasarkan Kelas PPPK

Tabel I.2

Distribusi PPTK Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Kelas.

No.	Kelas	Jumlah
1.	7	4
2.	9	2
Total		6 Orang

Dari tabel diatas tergambar bahwa kecukupan jumlah SDM Diskominfo untuk beroperasi dengan baik, ditambah dengan pejabat pengelola keuangan, termasuk bendahara, verifikasi, pembuat laporan, akutansi, pengelola barang. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kecukupan tenaga staf operasional yang membantu pejabat struktural *masih jauh dari cukup*.

b. Berdasarkan Pendidikan ASN

Selanjutnya, dipandang dari sisi lulusan tenaga yang ada di Diskominfo Payakumbuh tahun 2021, penyebaran skill tenaga masih sangat senjang. Tenaga lulusan S1 dan S2 yang tercantum dibawah ini sebanyak 25 orang hanya bisa untuk memenuhi tenaga struktural, sementara yang lainnya sebagai penopang pekerjaan masih belum memadai.

Tabel I.3

Distribusi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pendidikan.

Pendidikan	Jumlah
D3	4 orang
S1	21 Orang
S2	4 Orang
29 Orang	

c. Berdasarkan jabatan

Menurut jabatan, tenaga operasional pada Diskominfo Payakumbuh lebih didominasi oleh tenaga Harian Lepas yang difungsikan menurut skill dan juga administrasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.4
Distribusi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH	JUMLAH KETERANGAN
Eselon II	1	Kepala Dinas
Eselon III	3	Kepala Bidang Sekretaris
Eselon IV	2	Kasubag
Fungsional Tertentu	20	Fungsional Muda dan Pertama
Fungsional Umum	4	
	29	

Dalam pelaksanaan Operasional Diskominfo, dibantu dengan Tenaga Jasa Perorangan yang terdiri dari :

- a) Operasional Pemeliharaan jaringan TI untuk OPD layanan se- Payakumbuh, sebanyak 6 orang Tenaga Jasa Perorangan.
- b) Tenaga Jasa Perorangan Programmer, sebanyak 4 orang.
- c) Tenaga Jasa Perorangan Layanan Helpdesk, sebanyak 3 orang.
- d) Tenaga Jasa Perorangan Teknis Kehumasan, sebanyak 11 orang
- e) Tenaga Jasa Perorangan Tenaga Administrasi, sebanyak 1 orang
- f) Tenaga Jasa Perorangan Supir, sebanyak 1 orang

1.3.3. Sumber Daya Peralatan (aset)

a. Gedung Kantor

Dinas Komunikasi dan Informatika bertempat di salah satu ruangan Gedung Perkantoran Balai Kota Payakumbuh ex Lapangan Poliko, menempati ruangan di Lantai 3 (tiga). Ruangan yang tersedia saat ini terdiri atas Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretariat dan Ruang Server Data, dan Ruang Bidang Kehumasan dan Bidang e-Government.

Tabel I.5
Distribusi Ruangan Dinas Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Peruntukan, tahun 2024.

JABATAN		KETERANGAN
Ruang Kepala Dinas	4x3 m2	Tersendiri
Ruang Sekretaris Dan Sekretariat	8x4 m2	Bergabung
Ruang Bidang e-Gov	8 x 4 m2	Tersendiri
Ruang Bidang Humas	6 x 4 m2	Tersendiri
Ruang server 5	5 x 4 m2	Tersendiri
Media Center Ada	Ada	
Aula	Ada	
Gudang	Ada	
Pantry	Ada	
Toilet	Ada	

Melihat kepada jumlah ruangan yang tersedia sebagaimana tergambar pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan ruangan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika sudah baik.

b. Peralatan Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika mengemban 3 urusan, antara lain urusan Komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Untuk menjalankan urusan tersebut sebagaimana mestinya, sangat dibutuhkan peralatan yang memadai sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel I.6**Distribusi kendaraan operasional Diskominfo, tahun 2024.**

Jenis	Urusan Kebutuhan	Yang Tersedia
Kepala	Roda 4	Ada
Keseekretarian	Roda 4 = 2 unit	Ada
	Roda 2 = 5 unit	Ada
Bidang Kehumasan	Roda 4 = 1 unit	Ada
	Roda 2 = 3 unit	Ada
Bidang government	Roda 4 = 2 unit	Ada
	Roda 2 = 4 unit	Ada

Selanjutnya, terkait dengan peralatan kerja yang mendukung operasional urusan di masing-masing bidang juga masih ada yang belum memadai, sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel I.7**Distribusi Peralatan Kerja Diskominfo, tahun 2024.**

Jenis	Urusan Kebutuhan	Yang Tersedia
Kepala Dinas PD	Meja pimpinan	Ada
	Set Meja Tamu	Ada
	Set Meja Rapat	Ada
Keseekretarian	Mebeler Kerja	Ada
	Set Meja Tamu	Ada
	Set Meja Rapat	Ada
	Komputer	3 unit
	Laptop	7 unit
	Printer	5 unit
	Lemari Arsip	Ada
	Papan Informasi	Ada

Bidang Kehumasan	Mebeler Kerja Set Meja Tamu Set Meja Rapat Kamera Komputer Laptop Printer Scan Lemari Arsip Papan Informasi Radio Set HandyCame	Ada Ada Tidak Ada 9 unit 9 unit 6 unit 9 unit 1 unit Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada
Bidang e- government	Mebeler Kerja Set Meja Tamu Set Meja Rapat Kamera Komputer Laptop Printer Lemari Arsip Papan Informasi Safety Set Genset Server	Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 5 unit 30 unit 5 unit Ada Tidak Ada 1 unit 1 unit Belum Memadai
Aula	Set Aula Lengkap	Ada
Media Center	Set Media	Belum Lengkap

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni Tahun 2023-2026, berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Penetapan dokumen tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dengan *Stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dimuat program dan

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tujuan

“Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah di bidang penerapan e-government dan kehumasan”.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
			2023	2024	2025	2026
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah di bidang penerapan e - Government dan Kehumasan	Meningkatnya Layanan SPBE	Indeks Layanan SPBE	2,7	3	3,5	3,5
	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	75%	80%	85%	90%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kepuasan pengguna data statistik	80%	85%	90%	95%
	Meningkanya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	85%	85%	85%	90%
		Persentase penanganan cyber attack	85%	85%	85%	90%
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A

II.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Layanan SPBE	Indeks Layanan SPBE	Nilai	Sesuai dengan IKU Kota Payakumbuh	Nilai Indeks Layanan SPBE hasil penilaian MENPANRB	Laporan Bid e-Gov
2.	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	%	Sesuai dengan urusan kominfo	Jumlah PD yang mempublikasikan pembangunan daerah ----- X 100% Jumlah seluruh PD	Laporan Bid Kehumasan
3.	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral	Persentase kepuasan pengguna data statistik	%	Sesuai dengan urusan kominfo	Jumlah pengguna data statistik yang puas ----- X 100% Jumlah seluruh pengguna data statistik	Laporan Bid Kehumasan
4.	Meningkatnya kapasitas sistem keamanan informasi berklasifikasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	Sesuai dengan Perwako Nomor 99 tahun 2016 tentang SOTK maka urusan statistik berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah OPD Pengguna Layanan Keamanan Informasi dibagi dengan jumlah OPD dikali 100%	Laporan Bid -Gov
		Persentase penanganan cyber attack	%		Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan jumlah kasus yang ada dikali 100%	
5.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	Sebagai tolak ukur AKIP Diskominfo	Hasil penilaian oleh inspektorat kota	LHE dari Inspektora t

II.3. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Payakumbuh Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan SPBE	Indeks Layanan SPBE	3
2	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	80%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kepuasan pengguna data statistik	85%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	85%
		Persentase penanganan cyber attack	85%
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika.

III.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Nomor 86 Tahun 2017. sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Nomor 86 Tahun 2017., sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Payakumbuh Tahun 2023

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama OPD dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator

III.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Layanan SPBE	Nilai	3	3,75	125%
2	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	%	80 %	81%	101.25%
3	Persentase kepuasan pengguna data statistik	%	85 %	85%	100%
4	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	85 %	85%	100%
5	Persentase penanganan cyber attack	%	85 %	85%	100%
6	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A
7	Nilai IKM	Nilai	92	86,30	93,80

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada beberapa tabel berikut :

Dari 5 (lima) sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Target Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya Layanan SPBE	1	1	125	1	-	-	-
2	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	1	1	101.25	-	-	-	-
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	-	-	1	100	-	-
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	2	-	-	2	100	-	-
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	-	-	1	100%	1	93.80

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Layanan SPBE

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1 “

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		%	Kategori	Target Akhir Renstra (2026)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Indeks Layanan SPBE	2,7	3,17	3	3,75	3,5		3,5		125	Sangat Baik	100%
	Persentase Layanan yang terintegrasi TIK	70%	70%	75%	75%	85%		90%				
	Persentase Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	75%	75%	80%	80%	85%		90%				
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%		100%				
	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di Lingkup Pemerintah	87%	87%	89%	89%	90%		92%				

Daerah Kabupaten /Kota												
Persentase Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	75%	75%	77%	77%	79%		80%					

Sasaran Meningkatnya Layanan SPBE dapat dilihat dari indikator Indeks Layanan SPBE. Capaian kinerja indikator Indeks Layanan SPBE hasil penilaian tahun 2024 meraih angka 3,75 atau dengan predikat Sangat Baik melebihi yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Penilaian Indeks capaian SPBE dilaksanakan oleh MENPANRB terhadap pemerintahan daerah setiap tahunnya. Penilaian dengan menggunakan skala 0-4.

Tabel 3.5 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Kemenpan RB, 2024

Data dukung bidang penyelenggaraan e-gov untuk Layanan SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 belum ada dari Kementerian PAN RB, hasil indeks spbe hanya secara keseluruhan, belum di informasikan nilai tiap indikator layanan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2017 silam. Dalam pengembangan aplikasi yang disusun selalu memperhatikan Master Plan e-Government yang telah diterbitkan, dimana pengembangan aplikasi pemerintahan diarahkan kepada upaya-upaya pengintegrasian. Aplikasi- aplikasi tunggal dieliminasi sehingga pekerjaan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Layanan SPBE didukung oleh Program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/kota cerdas sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah. Output program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pengelolaan dan pengembangan aplikasi sistem Informasi Pemerintah Kota Payakumbuh dan terlaksananya pengelolaan jaringan fiber optik dan pemasangan jaringan wireless di Payakumbuh dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Layanan SPBE dalam pemerintahan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Peraturan Daerah kota Payakumbuh No.3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Dukungan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan kinerja bidang e-Government.
- 3) Dukungan dari pengambil kebijakan tingkat Pemerintah Kota Payakumbuh yang kuat untuk pengembangan TI terintegrasi di Kota Payakumbuh dibuktikan dengan tercantumnya indikator ini dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh pada RPD Periode 2023-2026.

Faktor Penghambat

- 1) Kebijakan/aturan/regulasi yang belum sepenuhnya dilakukan secara bersama-sama baik di Pemerintah Pusat / Daerah.
- 2) SDM ASN yang masih belum melek teknologi
- 3) Infrastruktur pendukung

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya Layanan SPBE dalam pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penambahan SDM berkualifikasi programmer di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.
2. Peningkatan analisis sistem dalam penyusunan aplikasi pemerintahan yang berbasiskan kepada aplikasi yang terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya dalam urusan yang berbeda.
3. Mengupayakan pemakaian database bersama antar aplikasi.
4. Penguatan infrastruktur TI di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh secara umum dan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Layanan Indeks SPBE dalam pemerintahan adalah Program Aplikasi Informatika

Tabel 3.7

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Meningkatnya Layanan SPBE	01.01	Indeks Layanan SPBE	Nilai	3	3,75	125	1	Program Aplikasi Informatika	3.083.658.100	2.292.994.058	74,36
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR									TOTAL PERSASARAN	3.083.658.100	2.292.994.058	



Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		%	Kategori	Target Akhir Renstra (2026)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	75%	70%	80%	81%	85%	-	90%	-	%	Sangat Baik	100%
	Persentase pelayanan penyaluran informasi pembangunan daerah melalui media	100%	100%	100%	100%	100%		100%				
	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	100%		100%				
	Jumlah Perangkat Daerah yang mempublikasikan data dan informasi publik melalui PPID	31 OPD	31 OPD	31 OPD	31 OPD	31 OPD		31 OPD				
	Persentase penyaluran pengaduan masyarakat melalui LAPOR SP4N ke PD	100%	100%	100%	100%	100%		100%				

Sasaran meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik tentang pembangunan daerah dapat dilihat dari indikator persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan Informasi melalui media. Capaian kinerja indikator persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi melalui media adalah sebesar 81 % dari target sebesar 85 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam arti, bahwa terdapat 85 Perangkat Daerah yang telah mempublikasikan informasi pembangunan baik melalui PPID maupun dalam pemberitaan atas kerjasama dengan media. Sehingga persentase



capaian kerjanya adalah sebesar 100%.

Cara Pengukuran atas capaian indikator persentase Perangkat Daerah yang mempublikasikan informasi pembangunan ini dilakukan melalui 3 (tiga) aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, dimana aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk dapat mempublikasikan data dan informasi publik serta informasi kegiatan pembangunan daerah lainnya kepada publik, sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

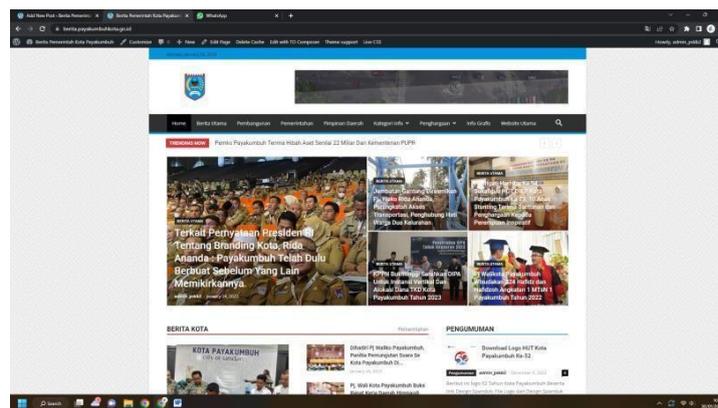
Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut meliputi website PPID, <http://berita.payakumbuhkota.go.id>, dan aplikasi Siwarta. Website PPID Kota Payakumbuh bisa diakses secara terbuka melalui <http://ppid.payakumbuhkota.go.id>. Website ini melayani kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan dokumentasi publik dari masing-masing Perangkat Daerah. Pada website PPID, masing-masing Perangkat Daerah diharuskan untuk dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang bersifat publik yang harus diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. PPID yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki wewenang untuk dapat meminta dan memperoleh informasi publik kepada OPD/unit kerja/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya. Dokumen dan Informasi ini diantaranya Renstra, Renja, Laporan Keuangan, SOP, peraturan yang terbit dalam kurun waktu tertentu, notulensi rapat, dan seterusnya. Dokumen tersebut selanjutnya di *upload* untuk dapat disimpan pada aplikasi PPID dan selanjutnya masyarakat/publik dapat mengakses dokumen tersebut melalui <http://ppid.payakumbuhkota.go.id>.



Gambar 3.1 Tampilan Aplikasi PPID, Tahun 2024

Pengelolaan keterbukaan informasi publik ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Sekretariat PPID Kota Payakumbuh.

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengembangkan website pada alamat <http://berita.payakumbuhkota.go.id>, dimana website ini menjadi media bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk memberitakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tiap Perangkat Daerah. Admin berita.payakumbuhkota.go.id akan mengupdate berita tentang Pemerintah Kota Payakumbuh setiap hari.



Gambar 3.3 Tampilan Alamat Berita

Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengembangkan aplikasi SiWarta. Aplikasi ini ditujukan untuk menghimpun seluruh berita yang berkaitan dengan Pemko Payakumbuh yang telah diterbitkan oleh media massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota



Payakumbuh. Aplikasi SiWarta menghimpun link berita yang diterbitkan oleh media online. Sementara untuk media cetak mitra kerja/wartawan akan meng input kan pdf dari setiap berita tentang Pemko Payakumbuh yang telah diterbitkan pada medianya.

Selain itu SiWarta juga dijadikan sebagai aplikasi kliping arsip pemberitaan dari media-media yang bermitra dengan Pemerintah Kota Payakumbuh. Melalui alamat website <http://siwartanew.payakumbuhkota.go.id>, aplikasi ini merupakan aplikasi pengarsipan berita dari seluruh media-media lokal yang ada untuk bisa tetap diakses dalam waktu tertentu. Kliping yang diarsipkan adala media cetak harian, media cetak mingguan dan media online yang bermitra dengan Pemerintah Kota Payakumbuh.



Gambar 3.2 Tampilan Aplikasi Siwarta, Tahun 2024

Adapun media-media yang bermitra dengan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 terdapat 78 media, mulai dari cetak, Radio, TV dan Online. Seluruh media yang ada menyampaikan kelengkapan dokumen media pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Data atas media tersebut dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.9
Jenis dan Jumlah Media Publik yang Bermitra Tahun 2024**

No	Jenis Media Massa	Jenis Media Massa
1.	Media Cetak Harian	7 Media
2.	Media Cetak Mingguan	8 Media
3.	Media Online	55 Media
4.	Media Online Grade I dan II Nasional dan Daerah	4 Media
5.	Radio	4 Stasiun



	JUMLAH	78 media
--	--------	----------

Sumber : Bidang Kehumasan Diskominfo, 2024

Tahun 2024 adalah tahun Kedua Renstra, capaian Tahun 2024 sebesar 85%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian kinerjanya sudah mencapai 85%. Data penunjang capaian kinerja indikator persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media dari Kepala Bidang Kehumasan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10

Data Perangkat Daerah Yang Mempublikasikan Informasi Pembangunan

No	Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi melalui PPID	Jumlah Berita Publikasi melalui Media
1	Setdako	9dokumen	96 berita
2	Satpol PP dan Damkar	7 dokumen	83 berita
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8 dokumen	50 berita
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9 dokumen	18 berita
5	Dinas Kesehatan	13 dokumen	257 berita
6	Dinas Pendidikan	5 dokumen	103 berita
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 dokumen	19 berita
8	Dinas Pertanian	5 dokumen	25 Berita
9	Dinas Koperasi dan UKM	7 dokumen	150 berita
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8 dokumen	37 berita
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6 dokumen	18 berita
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4 dokumen	58 berita
13	Dinas Ketahanan Pangan	8 dokumen	19 berita
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	12 dokumen	21 berita
15	Dinas Lingkungan Hidup	7 dokumen	44 berita
16	Dinas Perhubungan	7 dokumen	17 berita
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5 dokumen	20 berita
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	11 dokumen	30 berita
19	Dinas Sosial	4 dokumen	47 berita
20	Sekretariat DPRD	6 dokumen	35 berita
21	Inspektorat	4 dokumen	8 berita
22	BPBD	8 dokumen	48 berita



23	BKPSDM	9 dokumen	30 berita
24	BAPPEDA	8 dokumen	20 berita
25	Badan Keuangan Daerah	9 dokumen	18 berita
26	Kantor Kesbangpol	8 dokumen	15 berita
27	Kecamatan Payakumbuh Barat	8 dokumen	15 berita
28	Kecamatan Payakumbuh Timur	8 dokumen	18 berita
29	Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	7 dokumen	20 berita
30	Kecamatan Payakumbuh Utara	8 dokumen	17 berita
31	Kecamatan Payakumbuh Selatan	8 dokumen	13 berita
	Jumlah PD terpenuhi kriteria	31 PD	31 PD
	% Capaian dari 31 PD	100 %	100 %
	% Rata-rata PD ter-publikasi	100 %	

Sumber : Data Publikasi PPID dan <https://berita.payakumbuhkota.go.id>, 2024

Dari 31 perangkat daerah tersebut, untuk publikasi informasi publik melalui PPID, sudah terpublikasikan seluruhnya. Dalam persentase, capaian publikasi informasi publik melalui PPID dan publikasi informasi pembangunan melalui penyebaran kegiatan lewat media Perangkat Daerah mencapai 85%, sehingga capaiannya sudah 31 Perangkat Daerah dari 31 yang ada, atau 100%. Kesimpulannya bahwa dari kedua jenis media publikasi pembangunan tersebut capaian dari indikator ini berupa rata-rata capaian atas keduanya, sehingga capaian kinerja indikator ini menjadi 100%.

Capaian kinerja indikator Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media untuk Tahun 2024 sudah mencapai 85%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sejak tahun 2017 target ini sudah menjadi urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang mana sebelumnya target ini diemban oleh Bagian Humas Sekretariat Pemerintah Kota Payakumbuh.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik didukung oleh program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Layanan Hubungan Media. Output program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut antara lain terlaksananya peliputan semua kegiatan pemerintah Kota Payakumbuh dan terlaksananya kegiatan peliputan ke semua media elektronik dan media cetak, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.



Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Kerjasama yang terjalin dengan bidang e-Government, dimana penyusunan aplikasi Kehumasan dapat diselesaikan di tahun yang sama sehingga dapat langsung diimplementasikan dalam memenuhi target kinerja kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.
2. Hubungan yang baik antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan mitra media melalui Paguyuban Wartawan Luak Limapuluh Kota Payakumbuh yang tergabung pada Balai Wartawan.
3. Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Payakumbuh dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan dan informasi publik yang dapat disebarkan melalui media atau dipublikasikan melalui web PPID.

Faktor Penghambat :

1. Tenaga liputan pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum ada.
2. Kurangnya dukungan OPD tentang Implementasi UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Layanan Informasi dan Komunikasi Publik tentang pembangunan daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melengkapi peralatan dan perlengkapan pada Bidang Kehumasan.
2. Meningkatkan kapasitas tenaga peliputan pada Bidang Kehumasan.
3. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Humas sendiri.
4. Diadakannya sosialisasi tentang UU KIP No. 14 Tahun 2008

Adapun program yang mendukung pencapaian Layanan Informasi dan Komunikasi Publik tentang pembangunan daerah adalah program Informasi dan Komunikasi Publik.

Tabel 3.11
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi
Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	1.1	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	%	80%	81%	101.25	1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.291.684.136	1.203.539.168	93,18
								RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR			100	
		TOTAL PER SASARAN							1.291.684.136	1.203.539.168	93,18	



Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		%	Kategori	Target Akhir Renstra (2026)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Persentase kepuasan pengguna data statistik sektoral	80%	91,81	85%	91.08%	90%	-	95%	-	107.15%	Sangat Baik	95%
	<i>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%		100%				
	<i>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%		100%				
	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	80%	80%	85%	85%	90%		95%				
	Persentase PD terkait yang mengumpulkan data	50%	50%	50%	50%	50%		50%				
	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	5 jenis buku	5 jenis buku	4 jenis buku	4 jenis buku	4 jenis buku		4 jenis buku				
	Rata-rata waktu penyelesaian pengumpulan data statistik sektoral	6 Bulan		6 Bulan								

Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral dapat dilihat dari indikator kinerja Persentase Kepuasan Pengguna Data Statistik Sektoral. Capaian kinerja nyata indikator persentase kepuasan pengguna data statistik sektoral tahun 2024 terealisasi sebesar 91,81% dari jumlah 85% yang ditargetkan, hitungan ini berdasarkan survey yang dilakukan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah terhadap Publikasi Statistik Sektoral yang dilakukan, dimana Publikasi statistik ini merupakan produk dari Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri. Selain untuk memenuhi target pada LKjIP, survey ini dilakukan untuk memenuhi isian indikator kinerja daerah. Dimana kegiatan survei ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 12 ayat 2 bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan Statistik Sektoral di Instansi adalah dengan cara survei.



Tabel 3.13
Tingkat Kepuasan Pengguna Publikasi Statistik Sektoral
2024 Berdasarkan Kuisisioner yang telah dibagikan ke
beberapa ASN di lingkungan Pemko Payakumbuh

No	Nama OPD	Hasil	Persentase
1	Dinas Komunikasi dan Informatika (Statistik)	Sangat Baik	100,00%
2	Sekretariat DPRD Payakumbuh	Sangat Baik	92,50%
3	Setdako (Bagian Pemerintahan)	Sangat Baik	85,94%
4	BKPSDM	Sangat Baik	88,75%
5	Dinas Lingkungan Hidup	Sangat Baik	89,06%
6	Setdako Payakumbuh (Bagian Umum)	Sangat Baik	95,31%
7	Setdako Payakumbuh (Bagian Kesra)	Sangat Baik	99,06%
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Sangat Baik	85,00%
9	Dinas Pertanian	Sangat Baik	99,06%
10	BPBD Kota Payakumbuh	Sangat Baik	86,88%
11	Badan keuangan daerah	Sangat Baik	85,00%
12	Kecamatan lamposi tigo nagori	Sangat Baik	96,25%
13	Dinas Kominfo kota Payakumbuh (Sekretariat)	Sangat Baik	93,44%
14	Kelurahan Parambahan	Sangat Baik	89,69%
15	Kelurahan Koto Panjang Dalam	Sangat Baik	75,94%
16	Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh	Sangat Baik	95,31%
17	Dinas Kominfo kota Payakumbuh (Humas)	Sangat Baik	100,00%
18	Kecamatan Lampasi tigo nagori	Sangat Baik	86,88%
19	Kecamatan Payakumbuh Timur	Sangat Baik	96,25%
20	Dinas Kependudukan dan Capil	Sangat Baik	88,13%
21	Setdako Payakumbuh (Bagian Perekonomian)	Sangat Baik	92,50%
22	Dinas Pariwisata	Sangat Baik	91,88%
23	Dinas Koperasi dan UKM kota Payakumbuh	Sangat Baik	85,31%
24	Kantor lurah Parik Muko Aia kec. Lamposi Tigo Nagori	Sangat Baik	85,00%
25	Inspektorat	Sangat Baik	85,94%
26	Setdako (Bagian Perencanaan & Anggaran)	Sangat Baik	99,06%
	Total		91,08%

*) **Hasil** diperoleh dari Perhitungan Kuisisioner yang ditelaah dibagikan

*) **Persentase** diperoleh dari *Nilai dari hasil kuisisioner*

Hanya 26 Responden yang melakukan pengisian kuisisioner ini

Sumber : Penilaian Hasil Survey Kepuasan Pengguna Data Statistik Tahun 2024
(Pembagian Kuisisioner melalui Google Dokumen)



Tabel 3.14

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian
Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Kategori	Target Akhir Renstra 2026	%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Persentase kepuasan pengguna data statistik	80 %	91,81 %		85%	91,08 %		Sangat Baik	95%	

Pada tahun 2024 realisasi hampir sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 91,08%. Artinya peningkatan yang terjadi, jauh dari target yang telah ditetapkan, dari 100 % responden yang menjadi sasaran, hanya sekitar 68 % yang melakukan pengisian, namun hasil capaian yang diperoleh dari responden sangat memuaskan, artinya masih dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 Dengan target Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Kategori	Target Akhir Renstra 2026	%
1	Persentase kepuasan pengguna data statistik	85 %	91,08 %	107	Sangat Baik	95 %	

Telah 7 tahun lebih kurang kegiatan survey ini berjalan, semenjak diterbitkannya Publikasi Statistik Dinas Kominfo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, artinya survey kepuasan atas publikasi statistik sektoral ini tidak bisa berjalan jika produk yang akan dinilai atau diukur itu tidak tersedia. Seperti diawal pembentukan Dinas Kominfo di tahun 2017, kegiatan yang tertuang waktu itu hanya Publikasi dari Badan Pusat Statistik yakni Daerah Dalam Angka, sehingga ditahun tersebut kegiatan survey kepuasan belum bisa kita lakukan. Sasaran objek yang kita jadikan penilaian atas publikasi data statistik adalah ASN dan Perangkat Daerah terkait yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.



Pada survey kepuasan pengguna data statistik pada tahun 2024 ini terealisasi sebesar 91,08 % dari 68% OPD atau ASN yang melakukan pengisian pada kuesioner yang telah dibagikan. Artinya pada tahun 2024 ini tingkat kepuasan pengguna data statistik meningkat melalui produk dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diterbitkan berupa Publikasi Profil Statistik dan Publikasi Statistik Sektoral.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 Dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		%	Standar Nasional
		Target	Realisasi		
1	Persentase kepuasan pengguna data statistik	85 %	91,08 %	107	

Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu (Perangkat Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah (Perangkat Daerah) yang bersangkutan. Sebagaimana hal ini telah tertuang dalam Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, dimana Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik bertugas sebagai penyelenggara statistik sektoral sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri, atau bersama dengan BPS (Badan Pusat Statistik). Dalam menyelenggarakan statistik sektoral ini, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara survey, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dikatakan bahwa Instansi yang menyelenggarakan urusan statistik disebut sebagai Walidata, artinya instansi tersebut bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan. Sementara peran Produsen Data atau Walidata Pendukung diemban oleh Instansi Daerah yang menghasilkan data atau sumber data, dan BAPPEDA sebagai Koordinator Data atau Forum Data. Fungsi-fungsi penyelenggaraan data statistik yang tertuang didalam perpres nomor 39 tersebut tidak bisa terlepas dari BPS sebagai pembina data, karena BPS satu-satunya Instansi yang mengelola urusan statistik yang dapat memberikan rekomendasi atas instansi yang akan melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral ini, seluruh lembaga instansi yang terlibat mesti bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Adanya koordinasi yang baik antara Walidata, Produsen data dan Pembina Data akan dapat menghasilkan tujuan yang ingin



dicapai. Disisi lain beberapa faktor yang dapat mewujudkan kegiatan tersebut adalah kondisi kelembagaan dimasing-masing sektor data antara Walidata dengan Produsen Data meski diseragamkan ditambah penguatan dari sumber daya yang ada dan meningkatkan kuantitas serta kualitasnya.

Penyediaan data statistik di Produsen Data (Perangkat Daerah) sangat dibutuhkan dimana kelemahan kita saat ini, banyak yang belum mengerti arti pentingnya sebuah data dalam proses pembangunan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan hingga penyajian data menjadi kendala tersendiri.

Pengelolaan statistik sektoral merupakan indikator terpilih dalam urusan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh. Tahun 2016 urusan statistik ini merupakan urusan yang dikelola di Bidang Data dan Litbang Bappeda Kota Payakumbuh yang lebih fokus pada ketersediaan data terkait penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Seiring dengan peningkatan kebutuhan pencapaian target sasaran pengembangan statistik dalam pengambilan kebijakan daerah, masalah ketersediaan dan ketepatan waktu akses data statistik sektoral menjadi hal yang penting.

Seperti tahun sebelumnya, capaian kinerja sasaran untuk tahun 2024 didukung oleh program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Output program dan kegiatan tersebut adalah dihasilkannya publikasi statistik atau dokumen statistik, secara tidak langsung Perangkat Daerah ikut aktif berpartisipasi dalam menyelenggarakan statistik sektoral.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Urusan statistik sudah tersedia dan berdiri sendiri pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Payakumbuh walaupun masih pada tataran Eselon IV atau setingkat Seksi
2. Dukungan dari pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat, BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.

Faktor penghambat:

1. Belum disepakatinya ruang lingkup statistik sektoral yang akan disiapkan oleh Perangkat Daerah.



2. Beragamnya tatanan kelembagaan urusan statistik di Instansi Pemerintah, sehingga terjadinya perbedaan tugas dan fungsi kegiatan.
3. Kurangnya SDM yang menangani urusan statistik di Dinas Komunikasi dan informatika serta tidak tersedianya Tenaga/SDM yang mempunyai dasar statistik, jika dilihat dari tugas besar yang akan dilaksanakan.
4. Tatanan kelembagaan urusan statistik di Dinas Kominfo yang belum ideal dan tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang tertuang di perpres Nomor 39 tahun 2019.
5. Forum satu data telah berjalan namun belum maksimal, forum satu data saat ini fokus terhadap capaian penilaian kinerja seperti Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan statistik sektoral, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral sesuai metode yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Mendorong pemerintah pusat untuk menyeragamkan tatanan kelembagaan urusan statistik di Instansi Pemerintah.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM/tenaga yang ahli dibidang statistik (statistisi dan Analisis Data) dan tenaga IT (Programmer, Design Grafis, Sistem Analis).
4. Menyelenggarakan forum satu data secara terjadwal yang di fasilitasi oleh Bappeda selaku koordinator data dan sekretariat satu data bersama pembina data (BPS), Produsen Data (OPD) dan Walidata (Dinas Kominfo)
5. Penyediaan sarana maupun prasarana untuk menunjang kegiatan.
6. Dukungan anggaran untuk kegiatan

Adapun program saat ini dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral adalah program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Tabel 3.17

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan							
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%				
1	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	1.1 Persentase kepuasan pengguna data statistik	%	85%	91.08	107.15	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup kab /kota	56.697.650	55.436.050	97,77			
								RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR			107.15			
								TOTAL PER SASARAN			56.697.650 55.436.050 97,77			



Sasaran 4

Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		%	Kategori	Target Akhir Renstra (2026)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	85%	100%	85%	100%	85%		90%		%	Baik	100 %
	Persentase penanganan cyber attack	85%	100%	85%	100%	85%		90%				
	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85%	100%	85%	100%	90%		90%				

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dapat dilihat dari indikator persentase penanganan cyber attack.

Definisi attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi. Tindakan ini bisa ditujukan untuk mengganggu secara fisik maupun dari alur logic sistem informasi. Cyber attack merupakan upaya mengganggu informasi yang berfokus pada alur logic sistem informasi.

Pada Tabel di atas terlihat pencapaian realisasi indikator persentase penanganan cyber attack pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan 85%, ini berarti untuk semua kasus yang terjadi di tahun 2024 dapat ditangani dengan baik oleh



Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk tahun 2024, jenis serangan siber yang upaya pencurian informasi secara ilegal yang diterima lebih banyak dari tahun sebelumnya. Berikut daftar cyber attack yang terjadi selama tahun 2024.

Tabel 3.19

Daftar Cyber Attack yang terjadi di tahun 2024

No	Jenis cyber attack	Jumlah
1	Web server 400 error code.	2313980
2	CMS (WordPress or Joomla) login attempt.	21236
3	Brute Force Web server 400 error code	2231
4	High amount of POST requests in a small period of time (likely bot).	1630
5	Common web attack	587
6	CMS (WordPress or Joomla) brute force attempt.	457
7	A web attack returned code 200 (success)	92
8	XSS (Cross Site Scripting) attempt	69
9	Suspicious URL access	53
10	Multiple common web attacks from same source ip.	49
11	SQL injection attempt	8
12	PHP CGI-bin vulnerability attempt	2
13	Multiple XSS (Cross Site Scripting) attempts from same source ip	2
14	Shellshock attack attempt	1

Sumber : Data Cyber Attack Dinas Kominfo, 2024

Dilihat dari pencapaian pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, hal ini juga telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85% pada Tahun 2024 dengan realisasinya 100%. Hal ini dikategorikan sangat baik dalam pencapaian indikator persentase penanganan cyber attack yaitu sebesar 100 %.

Selain itu, pencapaian untuk Jenis informasi berklasifikasi persandian yang diamankan yang dikelola juga berhasil di realisasikan dengan persentase 100%. Jenis Informasi ini dikelola melalui layanan email berklasifikasi yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi negara yang dinamakan dengan email SANAPATI. Email sanapati merupakan salah satu layanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendukung pengamanan informasi di Pemerintah Daerah. Email sanapati memiliki fitur keamanan yang dapat meminimalkan risiko ancaman keamanan informasi melalui email antara lain bersifat close group yang hanya bisa mengirim dan menerima dari dan ke sesama email sanapati, menerapkan koneksi yang aman serta memiliki proteksi terhadap *malware*, *spam*, dan *phishing*.



Tabel 3.20

Daftar Informasi Berklasifikasi yang dikelola di tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	34
2	Februari	30
3	Maret	41
4	April	45
5	Mei	42
6	Juni	39
7	Juli	51
8	Agustus	51
9	September	47
10	Oktober	39
11	November	35
12	Desember	31
Jumlah		413

Sumber : Laporan SANAPATI 2024

Capaian kinerja sasaran ini untuk Tahun 2024 didukung oleh program penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Output program dan kegiatan serta sub kegiatan tersebut antara lain terlaksananya monitoring dan evaluasi kemanan informasi serta tersedianya layanan helpdesk di Kota Payakumbuh.

Tabel 3.20

Jumlah Pengaduan dan Layanan yang diproses melalui Helpdesk

No	Bulan	Jumlah Pengaduan
1	Januari	31
2	Februari	70
3	Maret	42
4	April	28
5	Mei	61



6	Juni	80
7	Juli	75
8	Agustus	68
9	September	73
10	Oktober	80
11	November	60
12	Desember	30
Total		667

Sumber : Laporan Pelayanan Helpdesk SPBE 2024

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator persentase penanganan cyber attack dan jenis informasi berklasifikasi persandian yang diamankan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Urusan Persandian sudah tersedia dan berdiri sendiri pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Payakumbuh walaupun masih pada tataran Eselon IV.
2. Dukungan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melakukan penataan persandian pada tatanan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
3. Telah digunakannya layanan *Secure Socket Layer* pada website yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh
4. Adanya penambahan perangkat Firewall dalam upaya melindungi keamanan informasi

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan peralatan kerja baik Hardware maupun Software untuk mendeteksi dan menangani gangguan/serangan cyber.
2. Tenaga persandian (sandiman) yang belum tersedia.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melengkapi perlengkapan persandian sesuai dengan standar.
2. Menyiapkan kapasitas SDM untuk menjadi sandiman yang handal.
3. Meningkatkan Kompetensi SDM keamanan Siber sesuai dengan perkembangan



teknologi.

4. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi bagi pengguna layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi adalah program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Tabel 3.21
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	1.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	85%	100	117,6	1	Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	598.009.376	563.324.887	94,20
		1.2	Penanganan Cyber Attack	%	85%	100	117,6					
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR						100				
										TOTAL PER SASARAN		598.009.376



Sasaran 5

Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		%	Kategori	Target Akhir Renstra (2026)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Nilai IKM	92	92	92	86.30	92		92			Baik	92
	Nilai Evaluasi AKIP Diskominfo	A	A	A	A	A		A		%	Sangat Baik	A
	Persentase capaian kinerja program /kegiatan	100 %	100%	100%	100%	100 %		100%				
	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90%	90%	90%	90%	90%		90%				
	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100 %	100%	100%	100%	100 %		100%				
	Persentase Layanan umum Diskominfo sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	100%		100%				
	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	100%	100%	100%	100%		100%				
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	100%	100%	100%	100%		100%				
	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %	100%	100%	100%	100 %		100%				

Sasaran Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari indikator hasil penilaian evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Inspektorat dan IKM. Untuk tahun 2024 nilai AKIP untuk Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat nilai A sesuai dengan target.

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh program Program Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu dan realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.22

Gambaran tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang/ Kurang
	Program Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.913.482.86 3	3.630.151.86 2		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	64.919.950	56.909.690		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	24.936.350	21.487.520	2 Dokumen	Menunjang
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.983.600	35.422.170	4 Laporan	Menunjang
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.141.394.185	2.911.302.733		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.958.050.185	2.735.030.733	24 Orang/Bulan	Menunjang
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183.344.000	176.272.000	12 Dokumen	Menunjang
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	Paket	Menunjang
4	Administrasi Umum Perangkat	384.582.900	373.344.844		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.603.400	2.386.000	1 Paket	Menunjang
2	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	5.750.000	5.050.000	1 Paket	Menunjang
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.126.050	25.215.000	4 Paket	Menunjang
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.399.850	11.634.600	2 Paket	Menunjang
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.259.600	3.990.000	3 Laporan	Menunjang
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.444.000	325.069.244	71 Laporan	Menunjang



5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	1	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>86.100.000</i>	<i>77.834.850</i>	<i>3 Unit</i>	<i>Menunjang</i>
	2	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Unit</i>	<i>Menunjang</i>
	3	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Unit</i>	<i>Menunjang</i>
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>2.208.000</i>	<i>1.920.000</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>Menunjang</i>
	2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>1.549.800</i>	<i>1.358.000</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Menunjang</i>
	3	<i>Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>60.218.028</i>	<i>59.882.845</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Menunjang</i>
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>39.190.000</i>	<i>31.250.600</i>	<i>1 Unit</i>	<i>Menunjang</i>
	2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>110.500.000</i>	<i>96.953.800</i>	<i>13 Unit</i>	<i>Menunjang</i>
	3	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Paket</i>	<i>Menunjang</i>
	4	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>22.820.000</i>	<i>19.394.500</i>	<i>22 Unit</i>	<i>Menunjang</i>
TOTAL			3.913.482.863	3.630.151.862		



Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Sarana dan prasarana
2. Sumber daya manusia
3. Anggaran

Faktor penghambat :

1. Kualitas sumber daya manusia

Untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dibandingkan dengan raelisasi anggaran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 5

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Targe t	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Diskominfo	Nilai	A	A	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.913.482.86	3.630.151.862	92,76
		Nilai IKM	Nilai	92	86,30	93,80		3		
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR			96,9			TOTAL PER SASARAN	3.913.482.86 63	3.630.151.86 2



III.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 8.943.532.125** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 7.745.446.025.-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **86,60%**, dari total anggaran belanja langsung yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika kondisi anggarannya adalah SILPA **Rp. 1.198.086.100.-**.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Misi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Layanan SPBE	3.083.658.100	2.292.994.058	74,36%
2	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	1.291.684.136	1.203.539.168	93,18%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor	56.697.650	55.436.050	95,26%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	598.009.376	563.324.887	94,20%
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.913.482.863	3.630.151.862	92,76 %
	Jumlah	8.943.532.125	7.745.446.025	86,60%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh pada Tahun 2024.



Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.26
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran I	1	125%	2.292.994.058	74,36%
1	Melebihi/Melampai Target	1	125%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Sasaran II	1	101.25%	1.203.539.168	93,18%
1	Melebihi/Melampai Target	1	101.25%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
C.	Sasaran III	1	107.15%	55.436.050	97,77%
1	Melebihi/Melampai Target	1	107.15%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
D.	Sasaran IV	2	117,6%	563.324.887	94,20%
1	Melebihi/Melampai Target	2	117.6%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
E.	Sasaran V	2	96,9%	3.630.151.862	92,76 %
1	Melebihi/Melampai Target	-	-		
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	1	93,80%		



III.4. Prestasi dan Penghargaan

Sampai tahun 2024 prestasi ataupun penghargaan yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Piagam penghargaan dari Telkom Indonesia sebagai Pemerintah Daerah yang telah siap mengimplementasikan Smart City Nusantara.
2. Piagam dari Walikota Payakumbuh untuk penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap OPD yang pengelolaan aset terbaik.



I.I. Gambar. 3.3 piagam yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kota Payakumbuh Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat baik

Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 96,9% atau interpretasi baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 8.943.532.125.-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 7.745.446.025.-** atau dengan serapan dana



APBD mencapai **86,60%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh kondisi anggaran dengan SILPA **Rp. 1.198.086.100.-** hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh telah berjalan secara optimal dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAYAKUMBUH**



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

JUNAIDI, ST
Pembina/ IV.a
NIP. 196601311998031003

